TAJUK RENCANA

Merelaksasi Kurikulum

PROBLEMA belajar secara daring mulai menuai masalah, di sejumlah tempat. Selain di Gunungkidul masih ada daerah blankspot dari jaringan internet, demikian juga di Kulonprogo di wilayah Kokap misalnya keluhan orangtua mulai muncul. Bukan tidak mungkin wilayah lain yang jauh dari jaringan internet, juga mengalami sehingga ketika harus belajar secara daring kerepotan.

Bukan hanya soal gagap teknologi dan banyak yang repot karena tidak punya handphone android, tetap keluhan karena di SD misalnya guru hanya memberikan tugas terus, yang oleh anggota DPRD Kulonprogo Muhtarom Asrosi SH, dianggap bukan hanya memberatkan saja, tetapi sangat jenuh. Sudah harus di rumah terus, tugas terlalu banyak .Masalahnya makin runyam, karena banyak siswa yang dititipkan ke kakek atau neneknya sehingga gagap teknologi masin terasa.(KR 21/7).

Dalam sebuah Webinar belum lama ini, Florischa Ayu Tresnatri peneliti dari The Semeru Research Institute mengemukakan masalah krusial dalam pelajaran daring dari hasil penelitian. Survei yang mengambil responden 407 orang SD, ternyata 24 persen guru di luar Jawa menyebutkan lebih dari setengah siswa di kelas tidak mengikuti pelajaran jarak jauh karena tidak punya alat komunikasi. Bahkan di sejumlah kelas, hanya 25 persen siswa yang punya alat komunikasi. Karena itu, guru sepakat untuk mengadakan pertemuan langsung dengan siswa. Masalah lain muncul, misalnya guru kesulitan dalam memantau perkembangan riil siswa. Belum lagi guru kesulitan menggunakan cara apa lagi untuk bisa mendukung proses pembelajaran tersebut. Karena itu, diminta Disdikpora untuk merumuskan kembali metode pembelajaran yang menyenangkan. Artinya, variatif.

Bukan hanya di Kulonprogo, tetapi desakan untuk membuat penyederhaan kurikulum selama pembelajaran daring, menjadi wacana yang sangat diharapkan guru. Dalam bahasa yang lebih mudah adalah kurikulum yang adaptif. Sebab pelaksanaan pembelajaran sekarang bukan hanya membuat stress siswa dan orangtua, tetapi guru juga menjadi lebih sibuk. Apalagi guru yang tidak muda lagi, karena gagap teknologi.

Memang seperti disuarakan oleh Wakil Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Satriwan Salim, kurikulum adaptif tersebut bukan berarti mengganti total Kurikulum 13 yang kini sedang digunakan. Konten yang penting kurikulum adalah merelaksasi serta menyederhanakan standar, isi penilaian, proses dan kompetensi kelulusan.

Kini tuntutan untuk penyerdehanaan kurikulum semakin banyak, karena memang dibutuhkan. Kalangan guru menyatakan bahwa yang paling gampang dalam hal tersebut adalah penggabungan mata pelajaran yang bisa disesuaikan. Dengan demikian dalam pelajaran jarak jauh tidak terlalu banyak pelajaran. Selain itu, Kemendikbud juga perlu mendesain ulang modul yang selama ini digunakan agar lebih ringkas. Sehingga siswa bisa menggunakan ketika harus belajar mandiri. Kemdikbud pernah menjanjikan modul-modul praktis, akan dikemas dalam bentuk video. Diharapkan video tersebut bisa juga dipahami oleh orangtua sehingga komunikasi akan lebih mudah.

Nah, ini tantangan bagi semua khususnya pemerintah. Kurikulum adaptif harus segera dibuat untuk panduan. Agar sekolah dan guru tidak membuat sendiri-sendiri, supaya proses pembelajaran tetap berjalan baik. ❑ - a

Pikiran Pembaca

Pikiran Pembaca terbuka bagi siapa saja. Naskah dikirim ke kantor Redaksi Kedaulatan Rakyat, Jalan Margo Utomo (P Mangkubumi) 40-42 Yogyakarta 55232 Fax (0274) 563125 Telp (0274) 565685 (Hunting) atau melalui email *pikiranpembaca@gmail.com.* Naskah dilengkapi fotokopi atau scan identitas diri berikut nomor telepon yang bisa dihubungi. Isi tanggung jawab penulis.

Sejarah Hari Keluarga Nasional

HARI Keluarga Nasional, 29 Juni lalu, gemanya terdengar kurang akrab di telinga sebagian besar warga masyarakat di Indonesia. Peringatan Hari Keluarga sebenarnya juga dimiliki oleh beberapa negara lain di dunia. Untuk pertama kalinya pada bulan Agustus tahun 1978, Amerika Serikat memperkenalkan Family Day. Afrika Selatan juga tercatat telah memperingati Hari Keluarga sejak 1995. Selain itu warga Australia merayakan Hari Keluarga pada setiap Selasa pekan pertama November.

Organisasi multilateral yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga telah menetapkan 15 Mei sebagai Hari Keluarga Internasional pada 1994. Bukan tanpa alasan 29 Juni dipilih sebagai Hari Keluarga Nasional. Berkaca pada sejarah perjuangan bangsa, kemerdekaan Indonesia diraih dengan perjuangan panjang melewati berbagai peristiwa heroik. Secara de facto Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, namun Belanda baru menyerahkan kedaulatan secara penuh kepada bangsa Indonesia 22 Juni 1949. Satu minggu setelah penyerahan kedaulatan, tepatnya 29 Juni 1949, para pejuang kembali untuk berkumpul bersama keluarganya. Momentum inilah yang melatarbelakangi Hari Keluarga Nasional.

Dalam nukilan sejarah, 29 Juni identik dengan Gerakan Program Keluarga Berencana (KB) Nasional. Kehadiran program ini sebagai upaya untuk menjawab persoalan kependudukan. Data kependudukan pada masa itu menengarai bahwa Total Fertility Rata (TFR) berada pada kisaran angka lima. Artinya, satu perempuan produktif memiliki rata-rata lima orang anak. Tingginya jumlah anak disebabkan adanya keinginan untuk menggantikan keluarga yang gugur di medan perang, sehingga mengakibatkan perkawinan usia dini sangat tinggi dan berdampak pada peningkatan angka kematian ibu dan bayi. Kondisi tersebut bertambah parah dengan meningkatnya angka infeksi dan gizi buruk.

Prof Dr Haryono Suyono merupakan inisiator Hari Keluarga Nasional. Pada masa orde baru, ia menduduki jabatan sebagai Ketua Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Tiga pokok pikiran disampaikan oleh Haryono antara lain, pertama, mewarisi semangat kepahlawanan dan perjuangan bangsa. Kedua, menghargai pentingnya peran keluarga untuk kesejahteraan bangsa. Ketiga, membangun keluarga menjadi pekerja keras dan mampu berbenah diri menuju keluarga sejahtera. Tiga gagasan tersebut disetujui oleh Presiden Suharto ditandai dengan Peringatan Hari Keluarga secara nasional pada 29 Juni 1993 di Provinsi Lampung. Harganas mendapat legalitas pada 15 September 2014 melalui Keputusan Presiden RI Nomor 39 tahun 2014 dan bukan hari libur.

Tujuan Hari Keluarga Nasional adalah menghidupkan kembali fungsi-fungsi yang ada dalam keluarga. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 menjelaskan bahwa ada delapan fungsi yang harus dijalankan oleh keluarga, di antaranya fungsi agama, sosial budaya, cinta kasih, saling melindungi, reproduksi, pendidikan, ekonomi, dan pembinaan lingkungan. Kedelapan fungsi tersebut dapat dijadikan rujukan yang bijak untuk menghadapi fase *new normal* pandemi Covid-19. Ketahanan keluarga sangat diperlukan sebagai sumber kekuatan untuk pembangunan Indonesia maju. ❑ - a

Farida Makruf SAg SPd,
Guru SD Negeri Mejing 1,
Anggota Komunitas
Penulis Gamping, Sleman.

Kemiskinan, Anak dan Problemnya

Saratri Wilonoyudho

PERINGATAN Hari Anak Nasional (HAN) 2020 dimaknai sebagai kepedulian seluruh Bangsa Indonesia terhadap perlindungan anak Indonesia. Agar mereka tumbuh berkembang secara optimal, dengan mendorong keluarga Indonesia menjadi lembaga pertama dan utama dalam memberikan perlindungan kepada anak. Upaya ini akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia dan cinta tanah air di masa pandemi Covid-19. Melalui kepedulian dalam menghormati, menghargai, dan menjamin hak-hak anak tanpa diskriminasi, serta memastikan segala hal yang terbaik untuk pertumbuhan dan perkembangan 79,55 juta anak Indonesia secara optimal (Profil Anak Indonesia 2019).

Setidaknya ada tiga golongan anak yang kini perlu mendapatkan perhatian serius. (1) Anak-anak yang ada di pengungsian, baik karena konflik atau karena bencana alam. (2) Anak yang terlepas perhatiannya dari orangtua, justru karena mereka anak orang kaya. (3)Anak-anak golongan miskin yang sulit bersekolah dan bahkan ada yang menjadi anak jalanan, pekerja seks, bekerja di pabrik.

Indeks Kemiskinan

Ada kaitan antara indeks kemiskinan dengan angka putus sekolah, tingkat melek huruf dan nilai rata-rata hasil ujian nasional. Demikian pula ada temuan bahwa partisipasi pada sekolah menengah didominasi kelompok kaya, ada disparitas capaian pendidikan antar kelompok pendapatan dan disparitas angka partisipasi kasar (APK) daerah kaya dan miskin. Menurut teori *household survival strategy* dari Harbirson (1981), masyarakat miskin akan memanfaatkan sumber-sumber ekonomi yang tersedia, jika kondisi ekonomi mengalami perubahan, Salah satu usaha itu ialah memanfaatkan tenaga kerja keluarga termasuk tenaga anak-anaknya.

Menurut ILO, dalam masa pandemi ini diperkirakan terjadi kenaikan anak yang dipekerjakan, karena orangtuanya miskin. Data 2002 dari International Programme on the Elimination of Child Labor (IPEC) menunjukkan ada sekitar 2,6 juta pembantu rumah tangga di seluruh Indonesia. Di antaranya 34,83% anak-anak. Dari jumlah itu, 93% di antaranya anak perempuan di bawah usia 18 tahun. Survei ILO tahun 2002 menyebutkan, pembantu rumah tangga anak-anak hanya bergaji antara Rp 125.000 ñ Rp 150.000 per bulan. Sedangkan yang mendapatkan gaji di bawah Rp 125.000 per bulan ada sekitar 15,7%. Padahal beban kerja mereka sangat berat sama halnya orang-orang dewasa.

Fasilitas Teknologi

Di sisi lain, anak-anak golongan kaya yang memiliki fasilitas teknologi informasi juga dihadapkan problem yang lain, ancaman pornografi. Apalagi anak-anak sekarang sudah sangat lebih dewasa dibandingkan umurnya, baik karena pengaruh gizi yang baik maupun karena lautan informasi tersebut. Lihatlah mereka sekarang sudah sangat akrab dengan internet, setidaknya HP. Cobalah disurvei, maka akan terkejut jika sebagian besar anak-anak kita yang setingkat SD pun sebagian besar sudah memiliki HP dan pandai membuka internet. Akan lebih terkejut lagi jika dibuka isi HP mereka, maka gambar-gambar porno akan dengan ëamaní tersimpan.

Di internet apa saja bisa dilahap anak-anak kita. Asal tahu kata kunci dan bisa mengetik kata kunci di Google. Dari titik itulah jelas kerja intelektual berlangsung dalam diri para pendidik. Namun kerja intelektual itu kini banyak yang tidak muncul, dan korbannya adalah anak-anak. Ini adalah problem serius lain yang dihadapi anak di era IT.

Jika ini terjadi dan terbiarkan, lautan informasi akan menjadi ancaman dan bukan lagi berkah. ❑ - a

***)Prof Dr Ir Saratri Wilonoyudho MSi**, *Anggota Dewan Riset Daerah dan Ketua Koalisi Kependudukan Jateng.*

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat.* Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Sewindu UUK, Sehati Berkarya

Tazbir & Haryadi Baskoro

PERINGATAN sewindu (8 tahun) terbitnya Undang-Undang No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY atau UUK (31 Agustus 2012-2020) semakin mendekat. Visi peringatan itu adalah 'Jogja Istimewa dalam berkarakter, bersinergi, berkarya, dan berdampak bagi Indonesia dan dunia'.

Berarti sudah sewindu Yogya mendapatkan undang-undang keistimewaan dan mengimplementasikan amanat-amanatnya. Dalam usia 8 tahun ini sudah saatnya kita melakukan banyak hal : evaluasi, refleksi, kontemplasi, revitalisasi, apresiasi, aspirasi, dan sebagainya. Spirit peringatan terangkum dalam '4B' yaitu berkarakter,bersinergi, berkarya, dan berdampak.

Karakter

Jogja istimewa dalam berkarakter, itulah refleksi sewindu UUK. Karakter energi Yogya yang (seharusnya) terbarukan berbicara tentang kepribadian luhur *kawula lan gusti* di bumi Mataram. Pengarusutamaan karakter sudah dimulai sejak Panembahan Senopati (1587-1601) yang menciptakan motif batik *parang* sebagai simbul pribadi luhur hingga Sultan Hamengku Buwono IX (1912-1988) dengan konsep luhur 'tahta untuk rakyat'.

Mengedepankan karakter sebagai energi pembangunan masa kini juga digerakkan dalam kepemimpinan Sultan HB X. Hal itu sangat terlihat dari visi DIY 2017-2022 yang berfokus memuliakan martabat manusia. Lima kemuliaan (panca mulia) martabat manusia itu mencakup kemuliaan dalam (1) kualitas hidup, (2) keragaman untuk kemajuan ekonomi, (3) harmoni dan toleransi, (4) demokrasi, (5) kemartabatan.

Jogja istimewa dalam bersinergi berbasis karakter. Sinergi itulah yang melandasi perjuangan multi-elemen Yogya ketika memperjuangkan UUK. Di era implementasi UUK, pertama-tama harus dirajut adalah sinergi semua elemen pendukung Keistimewaan DIY yang mencakup '5K' (1) kaprajan atau pemerintahan, (2) kraton, (3) kampung, (4) komunitas, dan (5) kampus. Semangat persatuan *(golong-gilig*) memberi kekuatan bagi pemerintah dan rakyat Yogya untuk berfokus, bersemangat, dan percaya diri dalam menjalani hidup yang produktif (*nyawiji, greget, sengguh ora mingkuh*).

Jogja istimewa dalam berkarya, itulah ukuran keberhasilan pembangunan. Secara sosiologis dikenal dua pendekatan yaitu *transformational approach* yang mengonsepsikan pembangunan sebagai perubahan struktur sosial yang radikal. Juga *improvement approach* yang mengkonsepsikan pembangunan sebagai perubahan dan perbaikan berkelanjutan tanpa mengubah struktur yang sudah mantap (Norman Long, 1977). Dalam konteks Yogya, bergabungnya Nagari Yogya menjadi DIY di dalam NKRI merupakan proses transformasi struktural yang radikal di mana sistem monarki beradaptasi dengan demokrasi keindonesiaan. Adapun pembangunan pasca-UUK bersifat *improvement* yang meneguhkan struktur Keistimewaan DIY. Pembangunan DIY pasca-UUK harus kuat dalam karya-karya inovatif dan kreatif. Agar perubahan dan perbaikan terukur dan berkelanjutan.

Parameter

Jogja istimewa dalam berdampak adalah parameter sukses kita yang harus terukur. Menurut UUK, dampak pembangunan Keistimewaan DIY adalah terwujudnya (1) pemerintahan yang demokratis, (2) kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat. (3) Tata pemerintah dan tatanan sosial berbasis ke-bhinneka-tunggal-ikaan, (4) pemerintahan yang baik, (5) Kasultanan dan Kadipaten menjadi pengembang budaya Yogya sebagai warisan budaya bangsa (UUK Pasal 5 ayat 1).

Sewindu UUK menunjuk pembangunan Keistimewaan DIY berbasis sistem kebijakan. Secara teoritis proses kebjakan mencakup tahap-tahap (1) penyusunan agenda, (2) formulasi dan legitimasi kebijakan. (3) Implementasi kebijakan, (4) evaluasi kinerja dan dampak implementasi kebijakan, (5) perumusan kebijakan baru (Ripley dan Franklin, 1986). Evaluasi kebijakan itu sendiri luas, tidak hanya bersifat teknis kuantitatif tetapi juga kualitatif dengan menilai *outcome* pembangunan (Owen Hughes, 1994). Spirit evaluasi harus dimaknai dalam konteks kebudayaan sebagai proses belajar. (Koentjaraningrat, 1981). Evaluasi implementasi Keistimewaan DIY jangan menjadi ajang saling menyalahkan, menghakimi, dan mencari kambing hitam. Fokus kita adalah bagaimana terus belajar agar Keistimewaan DIY semakin berdampak. ❑ - a

***)Tazbir SH Mhum**, *Ketua Panitia Peringatan Sewindu UUK DIY,*
***)Dr Haryadi Baskoro MA Mhum**, *pakar keistimewaan Yogya).*

Pojok KR

Simpang siur penggunaan 'Thermo Gun'

*** Asal benar, kalau bahaya, WHO pasti sudah melarang.**

Presiden minta dana Covid-19 harus cepat, tepat dan akuntabel.

*** Rakyat sudah menunggu.**

Pemkot akan gencarkan pemasangan wifi public.

*** Pilih wilayah pas, untuk mendukung belajar jarak jauh juga.**

Berabé

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.
Anggota SPS. **ISSN:** 0852-6486.
Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).
Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisijanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB.
Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yuriya Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSos.

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPt, Joko Budhiarto, Mussahada. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Drs Widyo Suprayogi, Dra Hj Fadmi Sustiwi, Dra Prabandari, Isnawan, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Atfiati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Drs Sihono HT, Agung Purwandono,. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis :** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)

Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankryk23@yahoo.com, iklankryk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 65.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris. maks. 10 baris) . Rp 12.000,00 / baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif . Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)
Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan
Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio :** KR Radio 107.2 FM.
Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:
Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.
Wartawan : H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.
Semarang : Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro : Isdiyanto Isman SIP.
Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No 5, Purwokerto, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd. Kepala Biro : Driyanto.
Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro : Sri Warsiti.
Magelang : Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Sumiyarsih, Kepala Biro : Drs M Thoha.
Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan : Suprapto, SPd Kepala Biro : Asrul Sani.
Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan - Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.